



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202022968, 15 Juli 2020

Pencipta

Nama : **Abubakar Eby Hara**
Alamat : Perumahan Sumber Alam Blok I, No. 5 , Jember, Jawa Timur, 68121
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Abubakar Eby Hara**
Alamat : Perumahan Sumber Alam Blok I, No. 5 , Jember, Jawa Timur, 68121
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengantar Ilmu Politik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Mei 2010, di Jember

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000194466

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



AM
AR-RUZZ MEDIA

Abu Bakar Ebyhara, Ph.D.

Pengantar ILMU POLITIK

"Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama."

Aristoteles

"Negara sebagai sebuah lembaga memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah."

Max Weber

PENGANTAR ILMU POLITIK

Abu Bakar Ebyhara

Editor: Meita Sandra
Proofreader: Nur Hidayah
Desain Cover: TriAT
Desain Isi: Ahmady Averoez

Penerbit:

AR-RUZZ MEDIA

Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Jogjakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-979-25-4795-5
Cetakan I, 2010

Didistribusikan oleh:

AR-RUZZ MEDIA

Telp./Fax.: (0274) 4332044
Email: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:

Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7900655
Malang: Telp.Fax.: (0341) 568439

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Ebyhara, Abu Bakar

Pengantar Ilmu Politik/Abu Bakar Ebyhara-Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2010

540 hlm, 13,5 X 20 cm

ISBN: 978-979-25-4795-5

I. Sosial-Politik

I. Judul

II. Abu Bakar Ebyhara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	5
KATA PENGANTAR PENULIS	7
DAFTAR ISI	13
I DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM ILMU POLITIK	17
A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK	17
B. PENGERTIAN ILMU POLITIK	35
C. OBJEK KAJIAN ILMU POLITIK	44
D. BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK	45
E. METODE ILMU POLITIK	48
II HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA	59
A. FILSAFAT	62
B. SEJARAH	64
C. ILMU EKONOMI	72
D. SOSIOLOGI	74
E. ANTROPOLOGI	76
F. PSIKOLOGI	80
G. ILMU HUKUM	83
H. ILMU BUMI DAN GEOGRAFI	84

III	PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK PALING BERPENGARUH	87
	A. YUNANI KUNO.....	92
	B. PEMIKIRAN POLITIK ROMAWI KUNO.....	113
	C. PEMIKIRAN POLITIK ZAMAN PERTENGAHAN	118
	D. PEMIKIRAN POLITIK MODERN.....	132
IV	KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN: DARI "TRIAS POLITICA" HINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	171
	A. PENGERTIAN KEKUASAAN.....	171
	B. "TRIAS POLITICA" DAN PEMISAHAN KEKUASAAN.....	186
	C. TRIAS POLITICA DI INDONESIA.....	209
	D. PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL.....	210
	E. FEDERALISME DI MALAYSIA.....	213
	F. WACANA FEDERALISME DI INDONESIA.....	215
	G. BEREBut KEKUASAAN: PARTAI POLITIK DAN PEMILU.....	220
V	TEORI NEGARA	229
	A. DEFINISI NEGARA	231
	B. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA.....	236
	C. TUJUAN NEGARA.....	239
	D. TIPE DAN BENTUK NEGARA.....	247
	E. GLOBALISASI DAN MITOS NEGARA MELEMAH.....	249
VI	TEORI DEMOKRASI	261
	A. MUNCULNYA IDE DEMOKRASI	261
	B. PERKEMBANGAN IDE DEMOKRASI	272
	C. EKSPANSI DEMOKRASI LIBERAL DAN RESPONS DUNIA KETIGA.....	298
	D. DEMOKRASI DI INDONESIA	322

VII TEORI POLITIK MARXISME	371
A. SURVIVALITAS TEORI POLITIK MARXISME.....	371
B. FILSAFAT MARXISME.....	381
C. TEORI MARXIS TENTANG NEGARA	409
VIII TEORI PERUBAHAN POLITIK: REFORMASI ATAU REVOLUSI	447
A. PERSPEKTIF PERUBAHAN.....	447
B. YANG BERKEPENTINGAN PADA PERUBAHAN	464
C. KAUM MUDA DAN PERUBAHAN.....	471
D. PERUBAHAN POLITIK INDONESIA PASCA-ORDE BARU	492
DAFTAR PUSTAKA	505
INDEKS	521
PROFIL PENULIS	533

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, kekuasaan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari tentang bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, dan digunakan. Ilmu politik juga mempelajari tentang bagaimana kekuasaan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ilmu politik juga mempelajari tentang bagaimana kekuasaan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari tentang bagaimana kekuasaan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari tentang bagaimana kekuasaan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



I

DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM ILMU POLITIK

A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Sebelum menjadi disiplin ilmu tersendiri, ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang terbilang cukup tua. Pandangan ini tentu muncul untuk mengartikan ilmu dan pengetahuan politik secara umum atau dalam pengertiannya yang luas. Apalagi, jika politik dipahami sebagai cara untuk menggapai sesuatu yang membuat relasi kekuasaan antara manusia dan alam maupun antara sesama manusia terjadi.

Tak salah jika manusia sepanjang kehidupan ini disebut sebagai "zoon politicon" atau makhluk politik. Disebut demikian karena selalu ada relasi kuasa dalam hubungan antar-sesama manusia, baik sejak zaman kuno yang diwarnai perang antar-suku, dominasi pemimpin dalam sebuah klan atau suku, hingga terciptanya suatu komunitas yang lebih modern seperti sekarang.

Model kekuasaan juga menunjukkan suatu perkembangan yang terus berubah.

1. Yunani: Cikal Bakal Filsafat Politik Barat

Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan keterampilan politik sudah ada sejak manusia ada, terutama sejak muncul pemikir-pemikir yang melontarkan bagaimana masyarakat seharusnya diatur dalam kebijakan dan bagaimana seharusnya negara yang baik atau warga negara yang baik. Jadi, seiring dengan kemunculan peradaban manusia, ilmu politik dalam arti luas ini dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang paling tua.

Di Yunani Kuno, misalnya, pemikiran politik dan pandangan tentang negara sudah mulai muncul pada 450 SM. Bahkan, layak untuk dikatakan bahwa pemikiran politik di dunia yang menjadi cikal bakal pemikiran dan filsafat politik modern berasal dari era Yunani Kuno ini. Hal ini didorong oleh perkembangan peradaban yang maju dibandingkan masyarakat dunia yang lain. Prestasi kulturnya yang tinggi membuat Yunani menunjukkan munculnya penyelidikan sistematis tentang watak dan jalannya institusi politik oleh para intelektual dan filsufnya.¹

Di Yunani Kuno-lah ide pemerintahan demokratis dibentuk dan pertama kali dipraktikkan. Nilai-nilai tentang kebebasan, hak individu, dan keadilan diakui. Masalah-masalah manusia hendak dipecahkan dan masalah negara mulai muncul ke permukaan. Kebajikan politik dan negara didiskusikan. Hasilnya sangat berpengaruh hingga sekarang.

1. Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 31—37.

Diangkatnya tema sosial-politik dan kenegaraan memang bukanlah filsafat paling awal di Yunani. Sebelumnya, pemikiran filsafat didominasi oleh filsafat alam, setelah pemikiran spekulatif yang terjadi terserap ke dalam masalah mitologi dan agama, sebuah kajian tentang manusia yang jauh dari pemikiran rasional.

Mulai munculnya filsafat tentang alam membawa benih-benih filsafat rasional. Dimulai dengan sarjana, seperti Thales (600—550 SM), para pemikir mulai mengarahkan upaya-upaya untuk mengkaji dan menganalisis watak dan struktur alam fisik. Pertanyaan yang sering muncul sejak Thales adalah zat apa yang menjadi bahan penyusun alam dan di manakah kesatuan yang di baliknya terdapat keragaman dan perubahan itu dapat ditemukan.

Baru mulai pada pertengahan abad ke-5 SM, pertanyaan-pertanyaan filsafat yang muncul mulai bergeser kepada hal yang lebih luas, mulai dari kosmologi hingga antropologi atau pandangan-pandangan tentang manusia. Mazhab kosmologi tampaknya mengalami pertentangan sebagaimana yang diwakili oleh Heraclitus dan Parmenides.

Selanjutnya, para filsuf Yunani mulai beralih pada kajian mengenai manusia sebagai makhluk etik, sosial, dan politik. Persoalan tentang alam fisik mulai ditinggalkan dan mulai melihat masalah negara dengan masalah-masalah yang diciptakan oleh manusia. Socrates mengawali dengan mengatakan bahwa kajian tentang manusia dan masyarakat, serta bagaimana hal ini diatur, merupakan masalah yang penting untuk dipecahkan.

Socrates (470—399 SM) adalah seorang yang sangat brilian. Ia terkenal dengan humornya yang menggelitik dan kemampuannya dalam memberikan jawaban-jawaban sehingga banyak para pemuda yang mengaguminya. Muridnya yang



II

HUBUNGAN ILMU POLITIK DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

Ilmu politik jelas memerlukan ilmu-ilmu lainnya untuk mengembangkan diri, baik untuk mempertajam analisis maupun memperluas objek kajiannya. Ini berarti bahwa sejak zaman kuno hingga zaman sekarang, ilmu politik diperkaya oleh disiplin ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial. Plato, misalnya, adalah pemikir yang tertarik memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga dan sifat-sifat pendidikan, sejauh hal-hal itu sesuai dengan sifat-sifat dasar negara yang ia idealkan.

Aristoteles juga sangat khawatir tentang adanya pembagian kekayaan dan status dalam masyarakat, sebagaimana dalam tiap-tiap rezim politik yang mereka punyai. Karl Marx memanfaatkan pengetahuan sejarah dan ekonominya untuk melihat relasi politik dalam masyarakat dan menganalisis dinamika politik berdasarkan perkembangan teknologi dan struktur kelas sosial yang merupakan kajian dari sosiologi.

Tak dapat dielakkannya ilmu politik dari disiplin ilmu lain memang berangkat dari kenyataan bahwa ilmu pengetahuan awalnya memang menjadi satu, sampai akhirnya terbagi menjadi disiplin ilmu tersendiri dan terpisah-pisah pada abad ke-19. Sebelumnya, yang namanya pengetahuan itu tak terpisah-pisah dan disatukan dalam filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan (*mother of science*), bahkan antara ilmu alam dan ilmu sosial juga tak terpisahkan. Bahkan, di awal-awal pertumbuhan filsafat, sebagaimana ditunjukkan di Yunani Kuno, setelah lelah dengan masalah mitologis, muncullah ketertarikan terhadap dunia fisik (alam). Artinya, manusia dianggap benda fisik yang menjadi bagian dari alam. Tak heran jika para pemikir (filsuf) Yunani paling awal sering disebut sebagai Filsuf Alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Para filsuf yang terkenal antara lain Thales, Anaximander, Anaximenes, Parmenides, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, Democritus, Herodotus, Thucydides, dan Hyppocrates.

Sejak kemunculan Socrates (470—399), cikal bakal ilmu sosial-politik mulai muncul bersamaan kecenderungan baru berupa kemunculan filsafat yang mengkaji masalah tentang manusia, masyarakat, dan segala sesuatu yang bersifat ideal. Plato-lah yang mengawali pembahasan mengenai masyarakat dan negara secara sistematis. Filsuf lainnya yang cukup terkenal adalah Aristoteles. Plato dan Aristoteles memang kerap dikenal sebagai dua orang pemikir besar yang sangat berpengaruh. Bahkan, sastrawan Coleridge sampai sedemikian jauh membagi manusia menjadi dua kelompok: Platonian dan Aristotelian.²⁴

24. Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik...*, hlm. 83.

Ilmu sosial mulai memisahkan diri dari filsafat sejak abad ke-19 dan ilmu politik masih menjadi bagian dari ilmu sosial ini dengan pengaruh ilmu filsafat yang sangat kentara. Sebagaimana dikatakan Gabriel Almond:

“Teori politik klasik lebih merupakan suatu sosiologi dan psikologi politik, serta suatu teori politik yang bersifat normatif daripada suatu teori tentang proses politik....

Klasifikasi berbagai tipe sistem politik dari Plato, Aristoteles, dan para terakhir Zaman Roma, jauh lebih tegas berpegang pada berbagai macam stratifikasi sosial serta perwakilan yang mereka miliki dalam sistem politik, menurut bentuk dan penampilannya, daripada berpegang pada berbagai macam proses pembuatan keputusan. Jadi, landasan klasifikasi politik lebih bersifat sosiologis daripada politik”.²⁵

Perlunya ilmu politik menjalin kerja sama dengan ilmu sosial lainnya sangat disadari oleh para pengembang ilmu politik. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemahaman tentang masalah-masalah politik yang ada di masyarakat. Perkembangan masyarakat tentu harus dipahami secara komprehensif. Banyak ilmuwan politik yang menaruh perhatian besar terhadap aplikasi teori-teori ekonomi untuk mendapatkan pemahaman mengenai masalah-masalah politik.

Perkembangan masyarakat yang pesat akibat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, masalah-masalah di perkotaan, mengharapakan ilmu

25. Gabriel Almond, “Political Theory and Political Science”, dalam Ithiel de Sola Pool (ed.), *Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory*, (New York: McGraw-Hill, 1967), hlm. 5.



III

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN POLITIK PALING BERPENGARUH

Pemikiran politik merupakan bidang kajian ilmu politik yang cukup penting. Kajian pemikiran politik memfokuskan pada penyelidikan pemikiran-pemikiran dari tokoh politik, filsuf politik, maupun kelompok sosial yang berpengaruh melalui ide-ide politiknya. Menurut A. Rahman Zainuddin, pemikiran politik berkaitan erat dengan sejarah dan esafat politik, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai, norma, etika, moralitas, dan idealisme politik.³⁵

Pemikiran politik terdiri dari elemen-elemen ide, obsesi, potensi intelektual dan sosialisasi politik, yang merupakan representasi realitas lingkungan sosial mengenai masalah negara, masyarakat, dan kekuasaan. Obsesi dapat dipahami sebagai pemikiran yang mencekam di benak seorang pemikir sepanjang

35. A. Rahman Zainuddin. "Pemikiran Politik", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 7, (Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia, 1990), hlm. 3.

waktu karena masalah itu amat dominan dan amat penting dibandingkan dengan yang lain-lain sehingga jarang sekali ia dapat melepaskan darinya. Orang yang memiliki obsesi tidak akan merasa nyaman melihat kenyataan yang ada. Ia tak dapat menerima kenyataan itu. Ia ingin mengubah kenyataan itu menjadi sesuatu yang lain yang menurut pandangannya jauh lebih baik, sesuai dengan obsesinya.

Sedangkan, mengenai potensi intelektual dan sosialisasi politik, menurut Alfian (1986), pemikiran seseorang dipengaruhi oleh potensi intelektual yang dimilikinya dan proses sosialisasi yang pernah diterima dari pengalaman kehidupan dan lingkungannya. Misalnya, lingkungan keluarga, pendidikan, atau organisasi sosial-politik yang diikutinya. Pengaruh latar-belakang budaya yang pernah dialaminya, dan perkenalannya dengan dunia luar atau pemikiran lain (seperti pendidikan dan bacaan) yang dapat dipakainya sebagai pembanding. Pendek kata, di samping faktor kecerdasan, corak pemikiran seseorang juga banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang pernah didapatkannya dari lingkungan.³⁶

Jadi, ada aspek internal dan eksternal yang membentuk pemikiran politik seorang tokoh atau pemikir. Di tingkatan internal, tentu ada aspek psikologis dan kognitif. Sebagaimana dikatakan Nurani Soyomukti (2008) dalam studinya tentang pemikiran politik Soekarno, Nasakom:

“Penemuan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan selalu muncul di benak manusia. Gagasan-gagasan yang paling berpengaruh dan dianggap sesuai dengan pengalaman dan dianggapnya benar, biasanya akan

36. Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 9.

mengendap dalam pemikiran. Endapan pemikiran itulah yang akan muncul kembali saat orang menjumpai realitas yang berkembang yang harus ditafsirkan dengan konsepsi yang sudah ada dalam pikirannya. Karenanya, pemikiran orang itu bisa dinamis, cepat berubah-ubah, tetapi seiring dengan kedewasaan umurnya juga akan menunjukkan bentuk sebenarnya.

Dalam pandangan psikologis, pengalaman-pengalaman masa kecil merupakan suatu fase yang sangat menentukan bagi perkembangan selanjutnya, tetapi lebih banyak berkaitan dengan dunia yang bukan berkaitan dengan pemikiran. Meskipun demikian, dunia pemikiran kadang tak mampu menjebol apa yang sudah terbentuk dan terbangun sebagai pikiran bawah sadar yang sudah ada sejak kecil.³⁷

Ungkapan “kadang dunia pemikiran kadang tak mampu menjebol apa yang sudah terbentuk dan terbangun sebagai pikiran bawah sadar yang sudah ada sejak kecil” merupakan ungkapan yang menarik Nurani Soyomukti, yang sering dilupakan oleh pengamat lainnya dalam menjelaskan masalah pemikiran politik. Seakan, Nurani hendak menegaskan tesis psikoanalisis Sigmund Freud tentang kekuatan bawah sadar yang membangun suatu ekonomi subjektif yang tak dapat dihancurkan oleh pengalaman objektif yang dialami kemudian hari.

Sinkretisme pemikiran Soekarno telah banyak dikatakan oleh para pengamat, termasuk Alfian (1986) di atas. Dalam studinya tersebut, tampaknya Nurani Soyomukti ingin menegaskan bahwa sinkretisme Soekarno—yang merupakan perpaduan antara nilai Jawa yang mistis dan feodal-kuno, agama Islam,

37. Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom*, (Yogyakarta: Garasi House of Book, 2008), hlm. 254.



IV

KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN: DARI "TRIAS POLITICA" HINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

▲ PENGERTIAN KEKUASAAN

Kekuasaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Kita melihat sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan individu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan terjadi sejak manusia itu ada, dalam berbagai bentuk tindakan yang lunak, hingga konflik dahsyat dan perang yang membutuhkan korban nyawa, darah, dan air mata.

Bentuk-bentuk kekuasaan, hubungan menguasai antar-negara juga mengalami berbagai macam bentuk seiring dengan adanya wilayah-wilayah geografis dan budaya manusia. Kekuasaan merupakan suatu konsep kuantitatif (dapat dihitung jumlahnya): luas wilayah, siapa orang dipengaruhi, lamanya

berkuasa, uang, dan barang yang dimilikinya. Secara filsafati, kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia.

Dalam tradisi pemikiran Barat, kekuasaan merupakan konsep paling sentral. Pemikir-pemikir yang lahir sejak zaman Yunani Kuno hingga abad modern, banyak yang menegaskan bahwa tujuan untuk mengejar kekuasaan merupakan gejala manusia paling dapat dipahami. Misalnya, Epicurus (341—270). Ia mendirikan aliran filsafat yang mendapatkan banyak pengikut—ia mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia hidup adalah untuk mendapatkan kenikmatan. Pandangannya dipengaruhi oleh etika kenikmatan Aristippus, seorang yang pernah menjadi murid Socrates, yang percaya bahwa tujuan hidup adalah kenikmatan indrawi setinggi mungkin, “Kebaikan tertinggi adalah kenikmatan. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan.”⁸⁵

Kita juga bisa mengacu pada Thomas Hobbes yang memberikan gambaran bahwa demi mengejar kekuasaan antar-manusia saling bertarung dan bahkan mirip serigala yang saling memangsa (*homo homini lupus*). Juga, Machiavelli yang mengajarkan bagaimana cara paling licik dan realistis dalam mengejar kekuasaan di tengah kepentingan yang saling bertarung antar-manusia dan kelompok.

Bagi tradisi Timur yang terkesan “tidak hedonis” dan dianggap lebih sufistik yang menekankan pada pengejaran spiritual dan menghindari kenikmatan duniawi, tentu bentuk-bentuk kekuasaan memiliki model yang agak berbeda. Biasanya, agama, tradisi, dan spiritualitas dianggap memiliki kekuatan untuk mengatur model kekuasaan yang ada. Meskipun demikian,

85. Jostein Gaarder, *Dunia Sophie...*, hlm. 153.

ada yang tetap memercayai bahwa pada dasarnya kekuasaan merupakan kebutuhan universal bagi semua manusia.

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat bagaimana pun bersahaja, besar, atau rumit susunannya.

Banyak para pemikir dan pengamat politik yang mendefinisikan apa itu “kekuasaan” (*power*). Miriam Budiardjo mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.⁸⁶

Definisi itu menekankan pada konsep “pengaruh” atau tindakan memengaruhi. Artinya, ia lebih mengacu pada proses atau aktivitas. Untuk mendapatkan kekuasaan, orang harus menempatkan dirinya untuk menjadi kekuatan yang mampu mengubah cara pandang, kesadaran, dan tingkah laku orang lain. Jika kita bisa memengaruhi orang lain, kita akan mudah membuat orang lain tersebut melakukan sesuatu sesuai apa yang kita harapkan. Meskipun perilaku dan tindakannya tidak sesuai benar sebagaimana kita harapkan, minimal pengaruh kita telah membuatnya melakukan sesuatu. Istilah pengaruh (*influence*) berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Pengaruh itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya pengetahuan,

⁸⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 35.



V

TEORI NEGARA

Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Mengapa demikian?

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (baca: alat) masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Unsur-unsur negara adalah hal-hal yang dianggap harus ada agar suatu kekuasaan dan wilayah layak disebut sebagai negara. Umumnya, negara terdiri dari empat unsur:

1. Wilayah
2. Rakyat

3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain (*de Facto* dan *de jure*)

Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia dapat menyatukan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini, boleh dikatakan negara mempunyai dua tugas:¹¹³

- Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan; dan
- Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur. Maka dari itu, semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus menempatkan

113. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 39.

diri dalam rangka ini.¹¹⁴ Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya, negara dianggap mempunyai sifat berikut:

Pertama, sifat memaksa (*coersive power*) agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban di dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Maka, negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Dalam hal demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaannya hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (baca: meyakinkan).

Kedua, sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Ketiga, sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.¹¹⁵

A. DEFINISI NEGARA

Banyak definisi yang berusaha memberi arti "negara". Di bawah ini adalah beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ilmuwan dan filsuf:

114. *Ibid.*

115. *Ibid.*



VI

TEORI DEMOKRASI

A. MUNCULNYA IDE DEMOKRASI

Demokrasi dalam sejarah peradaban dianggap sudah mulai muncul sejak zaman Yunani Kuno. Capaian praktis dari pemikiran Demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang disebut “negara kota (Polis)”. Polis adalah bentuk demokrasi pertama. Pericles dalam bukunya yang terkenal, *Funeral Oration*, menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi karena administrasinya berada di tangan banyak pihak. Demikian pula ahli drama Aeschylus dengan bangga berkesimpulan bahwa tidak ada pemerintahan di Athena karena rakyat adalah pemerintah.¹⁴⁰

Demokrasi berasal dari kata-kata Latin *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), selalu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Istilah *demokratia* mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad ke-5 M. Istilah ini mungkin telah

140. Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik...*, hlm. 37.

menggantikan ungkapan-ungkapan yang lama yang menyangkut *iso* atau “sama”, seperti terdapat dalam *isonomia* atau persamaan di depan hukum. Kata-kata *demokratia* mungkin telah diciptakan oleh para pengritik konstitusi Athena. Jika demikian keadaannya, kata-kata *demokratia* mempunyai pengertian yang tidak baik.¹⁴¹ Sebelumnya, pada abad ke-7 dan ke-6 SM, *demos* mungkin tidak mencakup massa rakyat. Namun, setelah pertengahan abad ke-5 SM, *demokratia* tampaknya telah digunakan pada umumnya dengan pengertian yang telah dimilikinya sampai sekarang ini, yaitu dengan pengertian “pemerintahan oleh rakyat”.¹⁴²

Abraham Lincoln (1808—1865) adalah presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-16, yang pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi diakui banyak orang dan negara sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia yang lebih baik dari saat ini. Meskipun demikian, penolakan terhadapnya juga tak sedikit jumlahnya.

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami sebab ia banyak memiliki kesamaan makna (variatif, evolutif, dan dinamis). Untuk itu, tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu,

141. Terence Ball dan Richard Dagger, *Political Ideologies and The Democratic Ideal*, (New York: Harper Collins Publishers), hlm. 23.

142. Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 158.

dikenal berbagai tipologi demokrasi. Berikut adalah empat contoh tipologi demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang, seperti yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

Tipe demokrasi ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat relatif paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai dengan fakta pembuatan UU, dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin dalam masyarakat-masyarakat kecil dan di bawah kondisi-kondisi sosial yang sederhana.¹⁴³

Di dalam demokrasi langsung, seperti pada suku-suku bangsa Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga masyarakat mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan keputusan-keputusan dari majelis rakyat. Anak-anak, kaum wanita, dan budak (apabila ada perbudakan) tidak memiliki hak politik. Saat ini hanya konstitusi-konstitusi dari sejumlah daerah bagian Swiss yang kecil-kecil yang memiliki karakter demokrasi langsung.

143. Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Jakarta: Rimdi Pers, 1995), hlm. 288.



VII

TEORI POLITIK MARXISME

A. SURVIVALITAS TEORI POLITIK MARXISME

Apa yang membuat marxisme selalu relevan sebagai sebuah teori tentang sejarah, masyarakat, dan politik? Tentu saja karena analisis teoretisnya yang dapat dikatakan canggih dan radikal. Khusus dalam kajian politik, marxisme memberikan analisis terhadap gejala kekuasaan, negara, dan perubahan politik. Yang lebih penting lagi, marxisme masih punya kekuatan dalam bentuk gerakan dan partai politik. Sebagaimana dikatakan Franz Magnis-Suseno bahwa marxisme bukan hanya teori, melainkan “juga ideologi perjuangan politis” yang menyemangati sebagian besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan dalam abad-20 mendasari kebanyakan gerakan nasional.²³²

232. Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. xi.

1. Marxisme Sebagai Ideologi Politik Buruh

Mengapa demikian? Mungkin hal itu telah dapat kita lihat dari fakta bahwa kekuatan politik marxis (sosialis, komunis) yang ada di berbagai negara memiliki basis massa yang kebanyakan terdiri dari kaum buruh, tani, dan kelas pekerja. Akan tetapi, yang penting untuk kita pahami adalah pandangan bahwa filsafat marxisme dibangun dari kepercayaannya bahwa teori tak bisa dipisahkan dengan praktik. Ilmu pengetahuan dan praktik tak bisa dipisahkan, tetapi merupakan suatu kesatuan.

Bagi Karl Marx, rujukan ilmu pengetahuan adalah membantu dalam upayanya mengubah realitas kenyataan alam atau kenyataan sosial. Kaum borjuis ingin mengubah realitas kenyataan alam, dan memang harus melakukannya untuk menghimpun modal. Dengan demikian, mereka membutuhkan ilmu alam. Namun, kaum borjuis tidak ingin mengubah sistem sosial, sebaliknya ingin mengabadikan struktur masyarakat yang ada. Makanya, di bidang sosial mereka membutuhkan ideologi defensif daripada pendekatan keilmuan. Itulah sebabnya, sebagian besar kegiatan yang dipandang sebagai ilmu sosial oleh kaum borjuis sebenarnya bukan ilmu sama sekali, melainkan upaya pembenaran struktur-struktur sosial yang ada untuk membodohi masyarakat. Kadang-kadang, kelas kapitalis memang perlu mengubah kenyataan sosial dalam batasan-batasan tertentu. Jadi, ilmu sosial borjuis memang menghasilkan beberapa pengetahuan, tetapi pengetahuan tersebut selalu terletak dalam (dan dikungkungi serta didistorsikan oleh) kerangka teoretis yang menghalangi pengertian keseluruhan sistem sosial secara lengkap.

Satu-satunya golongan yang berkepentingan serta berkemampuan untuk mencapai pengertian sistem sosial

secara lengkap itu adalah kelas buruh. Seperti dikatakan Marx, "Timbulnya ide-ide revolusioner mensyaratkan adanya sebuah kelas revolusioner." Maka, dasar status ilmiah marxisme adalah hubungannya dengan kelas buruh itu. Dari sini kita mendapatkan satu pemahaman untuk memahami tradisi marxisme yang sejati, yaitu marxisme berdasar sudut pandang perjuangan kelas buruh.

Pendek kata, marxisme adalah teori untuk seluruh kelas buruh secara utuh, independen dari kepentingan jangka pendek dari berbagai golongan sektoral, nasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, marxisme bertentangan dengan oportunisme politik, yang justru mengorbankan kepentingan umum seluruh kelas pekerja demi tuntutan sektoral dan atau jangka pendek. Fakta ini juga didukung sejarah kehidupan Karl Marx yang—meskipun ia berasal dari kelas menengah (borjuis kecil)—telah bergelut dalam kehidupan buruh dan aktivitas politiknya dalam memperjuangkan nasib buruh. Dengan demikian, dia ditempa dalam kehidupan yang tidak hanya berasal dari lingkungan borjuis kecilnya, tetapi ditempa dalam kondisi yang memungkinkan lahirnya sudut pandang yang tidak sepihak (kelas borjuis-kapitalis), dan dia menemukan teori materialisme dialektika yang memandu berbagai karyanya (mulai dari *Manuskrip Ekonomi dan Filsafat* hingga *Das Kapital*, dan tulisan-tulisannya yang lain). Marx telah melakukan renungan yang serius dan tidak sekadar menulis berdasarkan romantisme intelektualitas. Dia benar-benar menggunakan kapasitas otaknya untuk berfilsafat menganalisis kehidupan, terutama tentang kritiknya tentang ekonomi-politik. Maka, teori marxisme tersebut secara objektif ternyata menjatuhkan pilihan pada kaum buruh sebagai sudut pandanganya.



VIII

TEORI PERUBAHAN POLITIK: REFORMASI ATAU REVOLUSI

A. PERSPEKTIF PERUBAHAN

Segala sesuatu yang ada di alam dan dunia ini selalu berubah. Itu adalah hukum alam, hukum material yang menyusun alam kehidupan ini. Gerak dan perubahan adalah hakikat tertinggi. Bahkan, ada filsuf yang mengatakan bahwa diam adalah bagian dari gerak. Lihat saja, dalam kurun waktu sejarah yang amat panjang, kita telah melihat berbagai macam perubahan dalam banyak hal dan di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Di antara berbagai perubahan itu, ada yang bersifat pelan dan ada yang bersifat cepat, ada yang perubahannya tidak begitu besar, tetapi juga ada perubahan yang sangat luar biasa. Tentu kadang kita tidak menyadarinya. Akan tetapi, jika kita bisa mendapatkan informasi tentang muncul dan hilangnya suatu hal-hal material yang ada dalam waktu yang panjang,

kita akan tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang menyebabkan perubahan terjadi. Artinya, perubahan selalu terjadi karena suatu sebab yang merupakan bagian dari alam kehidupan yang saling berhubungan.

Perubahan yang lambat sekalipun, dalam jangka waktu yang lama, akan menunjukkan suatu hal yang perubahannya sangat mencolok. Artinya, perubahan material sedikit demi sedikit, lambat, tetapi pasti, akan menimbulkan suatu akumulasi tertentu yang menunjukkan perubahan mendasar. Jadi, yang namanya perubahan radikal/revolusioner ternyata juga tak bisa dilakukan secara mendadak. Perubahan radikal/revolusioner membutuhkan perubahan-perubahan kecil yang punya gerak akumulatif.

Dalam sejarah yang panjang, kita telah menemukan hal-hal baru yang kita lihat sekarang. Karena umur manusia terbatas dibandingkan alam yang luas dan lama ini, untuk melihat perubahan yang terjadi, kita butuh ilmu sejarah yang memberikan data-data tentang perubahan itu. Perubahan-perubahan sejarah di alam fisik dan hubungan antar-manusia itulah yang memberikan kita pengetahuan tentang pola-pola perubahan yang terjadi. Dari situlah, para ahli mempelajari bagaimana perubahan terjadi—sebut saja Teori Perubahan.

Di bidang politik, perubahan-perubahan yang ada juga menuntut para ahli politik mempelajari untuk menggambarkan pola-pola perubahan di masa lalu dan meramalkan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sejarah menunjukkan pola-pola kekuasaan yang ada di dunia ini, mulai bentuk hubungan dalam negara, hingga terjadinya perubahan politik dan pola-pola kepemimpinan. Terciptanya perubahan sejarah terjadi karena kekuatan sejarah yang terus tumbuh. Artinya, sejarah digerakkan oleh suatu kekuatan. Jika kekuatan itu besar

dan mengandung suatu arah gerak yang baru, kekuatan itu akan menentukan bentuk sejarah selanjutnya.

Dalam bidang politik, kita telah mengenal berbagai macam perubahan yang terjadi, misalnya lembaga keluasaan, mulai dari negara budak, negara kerajaan, hingga negara modern. Perubahan-perubahan menuju tiap tahap kadang diwarnai dengan gerakan dan benturan politik. Misalnya, munculnya negara modern. Untuk menuju ke sana, ternyata harus dilalui dengan pertentangan antara gerakan dan kekuatan baru dengan kekuatan lama yang kepentingannya tidak sama dan saling berbenturan. Hukum pertentangan itu adalah bagian dari hukum sejarah yang sangat penting. Perubahan tak jarang dilalui dengan pertentangan dulu. Negara modern dengan ide demokrasinya ternyata juga lahir dari pertentangan yang sengit antara kaum demokrat dan kaum feodal. Kaum demokrat mengadakan revolusi, seperti Revolusi Prancis yang berdarah-darah: Revolusi yang diawali dengan kaum demokrat yang tumbuh pesat yang menginginkan negara modern yang berprinsip pada kebebasan dan kesetaraan, dengan kaum monarkis yang masih ingin mempertahankan kerajaan.

Itu hanyalah salah satu contoh bentuk perubahan politik. Ada perubahan politik yang bersifat evolusioner dan reformis, ada juga yang bersifat radikal/revolusioner seperti kisah-kisah revolusi (Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, dan lain-lain).

1. Perubahan Evolusioner/Gradual

Perubahan evolusioner adalah perubahan yang bersifat panjang dan lama dan berjalan lambat. Tidak ada peristiwa-peristiwa atau kejadian alam atau masyarakat yang memicu terjadinya perubahan. Demikian juga dalam bidang politik. Sering muncul

DAFTAR PUSTAKA

- “ALBA, Solidaritas Amerika Latin”. Dalam *Pikiran Rakyat*, 15 Mei 2006.
1961. *Selected Works of Mao Tse-tung Vol IV*. Peking: Foreign Languages Press.
- Alfian. 1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel. 1967. “Political Theory and Political Science”, dalam Ithiel de Sola Pool (ed.), *Contemporary Political Science: Toward Empirical Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Anderson, Benedict. 1988. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anderson, Perry. 1979. *Lineages of Absolutist State*. London: Verso.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Anshari, Endang Saifuddin. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Archibugi, Daniele. 2004. "Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review". Dalam *European Journal of International Relations* 10(3).
- Arie, Sujito. "Demiliterisasi dan Radikalisme Sipil". Disampaikan dalam seminar dan peluncuran buku *Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi*, Sewindu IRE, Yogyakarta, 12 Juni 2002.
- Arif, Andi dan Nezar Patria. 1999. *Antonio Gramsci, Negara, dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfar, Muhammad. "Ulama dan Politik: Perspektif Masa Depan". Dalam *Ulumul Qur'an* No. 5, Volume VI, Thn. 1996.
- Ball, Terence dan Richard Dagger. t.t. *Political Ideologies and The Democratic Ideal*. New York: Harper Collins Publishers.
- Barents, J. 1965. *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Baso, Ahmad. 1999. *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeology Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Beetham, David. 1994. "Liberal Democracy and the Limits of Democratization". Dalam David Held. *Prospects for*

Democracy, North, South, East, West. Cambridge: Polity Press and Blacwell.

Bell, Daniel. 2006. *Beyond Liberal Democracy: Political Thinking for An East Asian Context.* Princeton: Princeton University.

Benhabib, Seyla. 1996. "Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy". Dalam Seyla Benhabib. *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political.* Princeton: University Press.

_____. 1996. *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political.* Princeton: University Press.

Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi.* Jakarta: Gramedia.

Chiloote, Ronald H. 1999. *Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme: Teori dan Praktik Revolusioner Amilcar Cabral.* Jakarta: Sahe Study Club dan Yayasan HAK.

Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengritiknya.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Engels, Frederick. 2004. *Asal Usul Keluarga, Negara, dan Kepemilikan Pribadi.* Jakarta: Kalyanamitra.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.* Yogyakarta: LKiS.

- Fatah, Eep Saifullah. 1998. *Bangsa Saya yang Menyebalkan: Catatan Tentang Kekuasaan yang Pongah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Faturahman, Deden dan Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Flechtheim, Ossip K. (ed.). 1952. *Fundamentals of Political Science*. New York: Ronald Press, Co.
- Friedman, Milton. 1982. *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fromm, Erich. 2001. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis. 1989. "The End of History?". Dalam *The National Interest*, Summer.
- Gaarder, Jostein. 2003. *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Gatara, A.A. 2008. *Sahid Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gewirth, Alan. 2005. *Marsilius of Padua: The Defender of Peace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gholipour, A. 2007. *Organizational Behavior*. Teheran: Center for Social Science.
- Grant, Ted dan Alan Wood. 1999. *Melawan Imperialisme*. Yogyakarta: Sumbu.

- Gurr, Ted. 1970. *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hadiz, Vedi R. 1992. *Politik, Budaya, dan Perubahan Sosial: Ben Anderson dalam Studi Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan SPES.
- Hallowell, J.H. 1950. *Main Currents in Modern Political Thought*. New York: Holt & Co.
- Hans Kelsen. 1995. *Teori Hukum Murni*. Jakarta: Rimdi Pers.
- Harre, R. 1995. *The Philosophies of Science, an Introductory Survey*. London: The Oxford University Press.
- Haryadi, Edy. "Perlawanan Tak Pernah Mati". Dalam *Balairung* No. 25/Tahun XII/1997, hlm. 38—39.
- Held, David. 1994. "Democracy: From City-states to a Cosmopolitan Order?". Dalam David Held. *Prospects for Democracy, North, South, East, West*. Cambridge: Polity Press and Blacwell.
- _____. 1994. *Prospects for Democracy, North, South, East, West*. Cambridge: Polity Press and Blacwell.
- Hikam, Muhammad A.S. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hirst, Paul dan Grahame Thompson. 2001. *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Penerbit: Yayasan Obor Indonesia
- Kartodikromo, Marco. 2000. *Student Hijo*. Yogyakarta: Bentang.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. "Bambu Runcing di Belakang Meja Perundingan". Dalam A.B. Lopian dan P.J. Drogglover

- (eds.). *Menyusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Komisi-CCPKS. 1955. *Sedjarah Partai Komunis Sovjet Uni: Boljewiki*. Djakarta: Jajasan Pembaruan.
- Kuhn, Thomas. 2000. *The Structure of Scintific Revolution*. Bandung: Rosda Karya.
- Kusumandaru, Ken Buddha. 2003. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Laclau, E. dan C. Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Lafargue, Paul. 2001. "Mengenang Marx". Dalam Erich Fromm. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lane, Max. 2007. *Bangsa yang Belum Selesai: Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto*. Jakarta: Reform Institute.
- Lasswell, Harold D. 1958. *Politics: Who Gets What, When, How*. Ohio: World Meridian Books.
- Lenin. 1958. *Imperialisme: Tingkat Tertinggi Kapitalisme*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Lev, Daniel S. 2001. Dalam Baskara T. Wardaya (ed.). *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Liddle, R. William. 2001. *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Mizan.

- Linantud, John L. 2004. "The 2004 Philippine Elections: Political Change in an Illiberal Democracy". Dalam *Contemporary Southeast Asia*, 27(1).
- Linz, Juan J. dan Alfred Stepan. 2001. "Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation". Dalam R. William Liddle (ed.). *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Mizan.
- Lubis, Mochtar (ed.). 1986. *Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno, 1957-1965*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Madjid, Nurkholis. 1997. "Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI". Lampiran dalam Materi Konggres ke-21 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Yogyakarta.
- Mangandaralam, Syahbudi. 1987. *Mengenal dari Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita dalam ASEAN*. Bandung: Penerbit CV Remadja Karya.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. "Satu-satunya Demokrasi RI yang Berhasil". Dalam *Menuju Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marx, Karl. 2001. "Economic and Philosophical Manuscripts". Dalam Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mas'ood, Mochtar dan Collin MacAndrews. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McGregor, Katharine E. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.
- Miftahuddin. 2004. *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*. Jakarta: Desantara.
- Mills, C. Wright. 2003. *Kaum Marxis: Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Molyneux, John. 2000. *Karl Marx Aku Bukan Marxis*. Yogyakarta: TePLOK PRESS.
- Muzani, Zaiful. 1999. "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi". Dalam Edi A. Effendy (eds.). *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*. Bandung: Zaman.
- Nasution, Adnan Buyung dkk. 1999. *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- O'Donnel, Guillermo dan Phillippe C. Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi. Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES.
- Oei Tjoe Tat. 1995. *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Sukarno*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Parekh, Bikhu. 1994. "The Cultural Particularistic of Liberal Democracy". Dalam David Held. *Prospects for Democracy, North, South, East, West*. Cambridge: Polity Press and Blacwell.

- Patria, Nezar dan Andi Arif. 1999. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Marcuse. t.t. *Bahasa Global*. t.p.
- Petras, James. 2001. "Globalisasi: Perspektif Sosialis". Dalam McGlobal Gombal. *Globalisasi Dalam Perspektif Sosialis*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbit Cubuc bekerja sama dengan Penerbit Sumbu.
- Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2002. *Imperialisme Abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Pontoh, Coen Husain. 2000. "Negara Sebagai Pelayan Modal: Tanggapan Terhadap Tulisan Ali Sugiharjanto". Dalam KRITIK-Jurnal *Pembaruan Sosialisme*, Vol. 3/Tahun I, November—Desember,
- _____. *Neo-liberalisme dan Gerakan Kelas Pekerja*, sumber tidak dapat diketahui penulis.
- Poole, Ross. 1993. *Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Poper, Karl. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prisma*, 20 Maret 1973.
- Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press.
- Robinson, William I. 1996. *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervension and Hegemony*. New York: Cambridge University Press.

- Robson, W.A. 1954. *The University Teaching of Social Science: Political Science*. Paris: Unesco.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia bekerjasama dengan Hasta Mitra.
- Russel, Bertrand. 2002. *The Problems of Phylosophy*. Yogyakarta: Ikon.
- _____. 2002. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Buck, Pearl. 1988. "China: Sebuah Pengantar". Dalam *Negara Bangsa*. Jakarta: Grolier International.
- Sabine, G.H. 1963. *Teori-Teori Politik*. Jakarta: Binacipta.
- Salam, Alfitra. 1991. "Malaysia: Dari Demokrasi Parlemen Menuju Demokrasi Eksekutif". Dalam *Jurnal Ilmu Politik 11*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samuel, Huntington P. 1983. *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sandbrook, Richard, Marc Edelman, Patrick Heller, dan Judith Teichman (ed.). 2006. *Social Democracy in the Global Periphery, Origins, Challenges, Prospects*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sanit, Arbi. 1999. "Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik". Dalam Muridan S. Widjojo (ed.). *Penakhluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Schmandt, Henry J. 2002. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Selden, Mark. 1972. *The Yenan Way in Revolutionary China*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Shklar, Judith N. 1996. *Montesquieu: Penggagas Trias Politica*. Jakarta: PT. Grafiti.
- Soe Hok Gie. 1990. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920.*, Frantz Fanon Foundation.
- Soekarno. 1961. "Lahirnya Pancasila". Dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung.
- _____. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- _____. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- _____. 1966. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soltau, Roger F. 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans.
- Soyomukti, Nurani. 2008a. *Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas: Mahasiswa di Era Kapitalisme dan Hedonisme*. Yogyakarta: Garasi.
- _____. 2008b. *Manusia Tanpa Batas*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- _____. 2008. *Soekarno dan Nasakom*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- _____. 2010. *Apakah Soekarno Otoriter?: Tinjauan Atas Pribadi Soekarno dan Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- Subandio, Sastrosastomo. 1998. *Manifes Kedaulatan Rakyat*. Malang: Front Demokrasi Kerakyatan.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.
- Sujatmiko, Budiman. "Bahaya Fasisme: Mitos atau Realitas?". Dalam *Kompas*, 28 Mei 2001.
- Supriyanto, Enin. 1999. *Menolak Tunduk: Menentang Budaya Represif*. Jakarta: Grasindo.
- Surono, Indra. t.t. *Globalisasi: Kompleksitas Yang Memerlukan Cara Pandang Baru*. Bogor: WACANA, ELSPAT.
- Suryadi, Sugeng. 1998. *Drama Politik Tanpa Skrip*. Bandung: Rosda Karya.
- Susanto, Astrid S. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Binacipta.
- Suseno, Franz Magnis-. 1992. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- _____. 2000. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'ie, Imam. 2000. *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran*. Yogyakarta: UII Press.
- Takashi Shiraisi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- The Liang Gie. 1978. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Lingkupan, dan Metodologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1991. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim ISAI. 1996. *Bayang-Bayang PKI*. Jakarta: ISAI.
- Varga, Y. 1968. *Politico-Economic Problem of Capitalism*. Moskow: Progress Publisher.
- Varma, S.P. 1990. *Teori-Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Von Schmid, J.J. 1984. *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer dalam Baskara T. Wardaya (ed.). 2001. *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wolf, B.L. 1953. *Reformation Writing of Martin Luther*. New York: Philosophical Library.
- Wood, Allan. 2006. *Reason and Revolt*. Yogyakarta: IRE Press.

Yakhot, O. 1965. *What is Dialectical Materialism*. Moskow: Progress Publisher.

Zaenorrofik, Ahmad. 2008. *China Naga Raksasa Asia*. Yogyakarta: Garasi.

Zainuddin, A. Rahman. 1990. "Pemikiran Politik", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 7. Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia.

Daftar Laman

Ariane, Zely. "Banyak Hal Terjadi di Venezuela". Dalam http://www.prd-online.or.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=1&lang.

Broadsheet of Resistance, "The Socialist Youth Organisation". Dalam www.resistance.org.au, edisi November/Desember 2001.

Hartono, Rudi. "Apakah Mungkin Menggratiskan Pendidikan?". Dalam *Jurnal Arah Kiri* atau <http://lmnd.wordpress.com/2007/08/06/apakah-mungkin-menggratiskan-pendidikan/>

Kusumandaru, Ken Buddha. "Eropa Memanas". Dalam <http://dsporganiser.topcities.com/bacaanprogresif/Buruh/EropaMemanas.thm>.

Lorimer, Doug. "Kelas-Kelas Sosial dan Perjuangan Kelas". Dalam <http://arts.anu.edu.au/suarasos/Kelas.htm>.

"Pengantar Ekonomi Politik". Dalam <http://www.indomarxist.net/>.

Mao Tse Tung. "On Protracted War". Dalam http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_09.htm.

_____. "Problems of War and Strategy". Dalam http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_12.htm.

Razif. "Bacaan Liar, Kebudayaan, dan Politik pada Zaman Pergerakan". Dalam <http://www.geocities.com/edycaby>.

Smith, David Michael. "The Growing Revolt Against Globalization". Dalam <http://www.impactpress.com/articles/avgsep02/globalization890>.

Wilpert, Gregory. "Pre-election Analysis Venezuela Enters Normality (Sort Of)". Dalam www.venezuelanalysis.com. Diakses pada Minggu, 3 Desember 2006.